



KR-Antara/Aloysius Jarot Nugroho

KONTES SAPI TUNGGANG: Sejumlah peserta menunggangi sapi mereka saat Kontes Sapi Tunggang di Boyolali, Jawa Tengah, Selasa (10/10/2023). Kontes sapi yang digelar Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Boyolali itu untuk mengangkat hasil potensi peternak sapi di Boyolali.

Polisi Sambungan hal 1

Ade menjelaskan dari enam orang yang diklarifikasi salah satunya adalah Menteri Pertanian SYL, sopir, dan ajudan dari Mentan SYL.

"Namun, sekali lagi kami mohon maaf untuk materi klarifikasi ataupun keterangan dimaksud belum bisa kami utarakan di sini karena ini merupakan proses penyelidikan sedang berlang-

sung dan masih berproses. Nanti akan terus kita perbarui (update) perkembangannya," kata Ade.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko menambahkan, kepolisian pasti mengusut kasus tersebut. Terkait hal itu dia meminta agar masyarakat bisa menunggu agar proses itu berjalan sesuai

prosedur. "Ini masih proses penyelidikan, jadi tidak ada yang berandai-andai tapi proses ini masih kesinambungan ya, tentunya bisa paham betul apa yang harus ditempuh oleh penyelidik dalam hal ini saya sampaikan sekali lagi ini belum berhenti," kata dia. "Jadi kita tunggu saja hasilnya," ujarnya.

(Ant/Has)-d

Pemerintah Sambungan hal 1

"Tujuan program ini adalah menjamin akses energi bersih yang terjangkau, andal, dan berkelanjutan. Selain itu, program ini bertujuan mengurangi impor elpiji yang digunakan untuk memasak, meningkatkan konsumsi listrik perkapita serta mendukung teknologi memasak yang lebih bersih," katanya.

Jisman menyampaikan program penyediaan AML yang direncanakan sebanyak 500.000 unit pada 2023 di seluruh Indonesia itu berpotensi meningkatkan konsumsi listrik sekitar 140 gigawatt hour (GWh), setara dengan kapasitas pembangkitan 20 megawatt (MW). Program itu juga berpotensi menghemat elpiji sekitar 29 juta kilogram atau setara 9,7 juta tabung 3 kilogram (kg).

"Program ini akan bermanfaat kepada pelanggan yang dapat menurunkan biaya sebagian memasak yang sebelumnya menggunakan elpiji. Untuk pemerintah, program ini dapat mengurangi subsidi impor elpiji 3 kg yang digunakan untuk memasak. Bagi PLN, program ini dapat meningkatkan penjualan listrik," kata Jisman.

Jisman juga mengatakan target rumah tangga penerima AML, yaitu pelanggan PLN atau PLN Batam berdaya 450 volt ampere (VA) sampai dengan 1.300 VA

yang berdomisili di daerah tersedia listrik 24 jam menyala dan rumah tangga tersebut tidak memiliki AML. "Alat masak listrik ini harus memiliki kandungan dalam negeri yang dibuktikan dengan sertifikat TKDN (tingkat komponen dalam negeri), sesuai standar nasional Indonesia, dan memiliki label hemat energi. Spesifikasi AML yang akan didistribusikan, antara lain berfungsi minimal memasak nasi, menghangatkan dan mengukus dengan kapasitas sebesar 1,8 sampai dengan 2,2 liter," ujarnya.

Program tersebut, merupakan hibah dari pemerintah sehingga perlu disematkan stiker yang bertuliskan 'Hibah Kementerian ESDM' dan 'Tidak untuk diperjualbelikan'. Saat ini, Ditjen Ketenagalistrikan selaku pelaksana program sedang menyiapkan data calon penerima AML berdasarkan usulan dari kepala desa atau pejabat setingkat. Kemudian, dilakukan verifikasi yang melibatkan PLN dan PLN Batam dan dilakukan pengadaan dan pendistribusian kepada masyarakat.

Terkait pembagian rice cooker tersebut, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menyebut pemerintah perlu memastikan pemberian rice cooker benar-benar digu-

nakan untuk memasak oleh para penerimanya. Hal itu agar pemberian rice cooker, sebagaimana Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 11 Tahun 2023 bisa berjalan efektif guna mencapai target, yaitu untuk meningkatkan konsumsi listrik serta menghemat impor LPG.

"Menurut saya yang perlu dipastikan adalah masyarakat yang menerima itu akan menggunakan untuk memasak," katanya di Jakarta, Selasa (10/10).

Fabby menuturkan penyediaan alat masak berbasis listrik memang telah direncanakan oleh pemerintah sejak lama. Rencana itu awalnya dilakukan lewat penyaluran kompor listrik, yang kemudian tidak disetujui oleh DPR RI. Akhirnya, rencana tersebut kini akan terealisasi lewat pengadaan penanak nasi. Rencana penyaluran penanak nasi gratis ini tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penyediaan Alat Memasak Berbasis Listrik Bagi Rumah Tangga, di mana petunjuk teknisnya telah diturunkan melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 548.K/TL.04/DJL.3/2023. "Jadi sudah ada permen dan aturan pelaksanaan dari programnya. Artinya sudah melalui proses dan dibuat anggarannya. Jadi ini sudah disepakati dan harus berjalan," katanya.

(Ant/Has)-d

Korban Sambungan hal 1

Di daerah konflik niscaya sudah biasa menyaksikan mayat-mayat bergelimpangan. Nyawa seolah tidak lagi berharga. Warga sipil yang tidak tahu apa-apa, mereka kini menjadi korban perang. Seperti dilaporkan di berbagai media, tidak sedikit warga sipil kini disandera tanpa tahu apa kesalahan mereka. Mereka diculik, disiksa dan dijadikan sandera untuk menekan musuh. Warga sipil di permukiman, tidak sedikit yang dijadikan perisai hidup. Para tentara yang terlibat perang, mereka biasanya tidak peduli berapa banyak warga sipil yang menjadi korban. Untuk menghindari agar musuh tidak menyerang membabi buta, maka warga sipil seringkali dijadikan tempat untuk berlindung.

Mencari solusi bagi kejadian perang bukanlah hal yang mudah. Ketika pihak-pihak yang berkonflik memiliki alasan dan dasar yang kuat untuk berkonflik, maka yang terjadi umumnya adalah dendam keumatan. Berbeda dengan konflik biasa karena perbedaan pendapat, konflik dalam pe-

rang niscaya akan melahirkan luka batin yang mendalam.

Hati siapa yang tak tertohok. Ketika warga sipil menyaksikan anak, istri dan suami serta kerabatnya meninggal dunia: tewas karena diserang musuh. Luka psikologis warga sipil niscaya akan makin menganga. Ketika rumah tempat tinggalnya luluh-lantak. Anak dan istri atau suaminya tewas di tempat kejadian tanpa bisa membela diri. Ini semua niscaya membuat korban-korban perang selalu jatuh pada penderitaan yang mendalam. Perang selalu melahirkan kekalahan dan penderitaan bagi semua pihak, khususnya warga sipil. Amnesty International, misalnya telah mengingatkan pada pihak-pihak yang tengah berperang agar menghindari jatuhnya korban yang semakin besar dari kalangan warga sipil. Organisasi kemanusiaan itu menyerukan agar aparat keamanan dan militer Israel serta kelompok Hamas berupaya semaksimal mungkin untuk melindungi warga sipil di tengah pe-

rang terbuka seperti sekarang ini.

Untuk meringankan penderitaan warga sipil yang menjadi korban perang, kini berbagai lembaga donor telah berusaha mengirimkan bantuan kemanusiaan dan petugas medis untuk membantu mengobati korban perang. Perang yang membabi buta bisa dipastikan akan membuat warga sipil makin menderita.

Para pemimpin dan tokoh masyarakat di berbagai belahan dunia, semua berharap agar konflik terbuka Israel dan Hamas dapat segera diakhiri dan dilakukan gencatan senjata. Menurunkan tensi dan membuka jalur perundingan perlu segera dilakukan agar eskalasi konflik tidak makin menggila. Deeskalasi perang sangat dibutuhkan agar masyarakat sipil yang menjadi korban perang tidak makin meningkat. Inilah upaya yang harus dilakukan semua pihak untuk menyelamatkan warga sipil agar tidak menjadi korban perang (*).

(Penulis adalah Dekan FISIP Universitas Airlangga)-f

Uji Sambungan hal 1

Berikutnya, Perkara No 90/PUU-XXI/2023 dengan pemohon warga negara Indonesia (WNI) bernama Almas Tsaqibbiru Re A. Ia memohon syarat pencalonan capres dan cawapres diubah menjadi berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Ada pula Perkara No 91/PUU-XXI/2023 yang diajukan mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Arkaan Wahyu Re A. Pada pokoknya, meminta batas usia capres-cawapres diturunkan menjadi

sekurang-kurangnya 21 tahun.

Lalu, Perkara No 92/PUU-XXI/2023 diajukan WNI bernama Melisa Mylitiachristi Tarandung. Ia memohon batas usia capres cawapres diubah menjadi berusia paling rendah 25 tahun.

Selain pembacaan putusan, MK juga akan menggelar sidang pengucapan putusan/keputusan untuk Perkara No 105/PUU-XXI/2023. Perkara tersebut diajukan WNI bernama Soefianto Soetono dan Imam Hermanda, memohon batas usia capres cawapres menjadi 30 tahun. (Ant)-f

Konflik Sambungan hal 1

Namun Abdillah Onim yang sudah 12 tahun mukim di Gaza mengakui situasi konflik yang saat ini berlangsung di Jalur Gaza merupakan salah satu yang terparah sejak 15 tahun silam atau tahun 2008 lalu.

"Hal ini diperparah rencana Pemerintah Israel menutup semua akses air, listrik dan kebutuhan dasar bagi masyarakat Gaza. Terlebih lagi, lebih dari 70 persen masyarakat Jalur Gaza tidak dapat bekerja dan bergantung bantuan internasional," sebutnya.

Namun, hingga saat ini, Bang Onim beserta komunitas WNI di Jalur Gaza tetap menjaga komunikasi intens dengan misi diplomatik Indonesia yang terdekat dengan Gaza, yakni KBRI Kairo.

Sementara Diplomat Kementerian Luar Negeri RI Dr Aji Surya menyampaikan, konflik saat ini dapat menjadi preseden bagi Pemerintah Israel untuk memperkuat kontrol dan kuasa atas Jalur Gaza. Sepanjang konflik yang telah berlangsung antara Israel dan Palestina, terlihat bahwa Israel selalu menggunakan momentum konflik bersenjata untuk mencaplok wilayah-wilayah Palestina secara paksa. "Penyelesaian yang adil terhadap konflik Israel-Palestina di Jalur Gaza tidak akan mudah. Terlebih ada bias amat kuat dari negara-negara Barat yang lebih condong terhadap Israel dan tiadanya dukungan yang solid dari negara-negara Arab dan Muslim terhadap Palestina," katanya. (Fsy)-f

Disiapkan, Sambungan hal 1

"Untuk lokasi yang masih memungkinkan pergerakan yang relatif aman, seperti beberapa titik di Israel, diminta para WNI untuk segera meninggalkan wilayah tersebut, termasuk bagi para WNI wisatawan," ujar Direktur Perlindungan WNI Kemenlu RI Judha Nugraha melalui pesan singkat, Selasa (10/10).

Nugraha menyampaikan, situasi keamanan di lapangan tergantung lokasinya baik di Palestina maupun Israel. Berdasarkan data terbaru diketahui terdapat 45 WNI di Palestina, di antaranya 10 WNI berada di Gaza dan lainnya di Tepi Barat.

Selain ke-45 WNI tersebut, terdapat 230 WNI yang sedang melakukan wisata religi di berbagai titik di Israel dan hingga saat ini tidak ada laporan WNI yang menjadi korban.

Presiden RI Joko Widodo mendesak agar perang antara Israel dan Palestina segera dihentikan, untuk menghindari semakin bertambahnya korban dan hancurnya harta benda. "Karena eskalasi konflik dapat menimbulkan dampak kemanusiaan yang lebih besar," kata Presiden Jokowi ketika menyam-

paikan pernyataan pers terkait situasi terkini konflik Israel-Palestina, yang disiarkan di akun YouTube Sekretariat Presiden, Selasa.

Presiden Jokowi mengatakan, dirinya telah meminta Menteri Luar Negeri Retno Marsudi serta kementerian/lembaga terkait untuk segera mengambil tindakan cepat untuk melindungi WNI di wilayah konflik. "Akar konflik tersebut yaitu pendudukan wilayah Palestina oleh Israel, harus segera diselesaikan sesuai parameter yang sudah disepakati PBB," kata Jokowi.

Kemenlu RI sedang menyiapkan rencana kontingensi evakuasi WNI dengan beberapa skenario situasi. Skenario tersebut mencakup kemungkinan mengevakuasi WNI melalui negara-negara terdekat Palestina, yaitu Yordania, Lebanon, dan Mesir. "Saat ini Pemerintah melalui KBRI Amman, KBRI Beirut, dan KBRI Kairo sedang berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mengevakuasi WNI yang berada di wilayah Palestina, khususnya 10 orang WNI yang berada di Jalur Gaza," kata Juru Bicara Kemenlu RI Lalu Muhamad Iqbal. (Ant/San/Ati)-f

Lautan Sambungan hal 1

Para Pemimpin Forum AIS juga mengenakan batik, salah satunya Perdana Menteri Timor Leste Xanana Gusmao yang hadir dengan mengenakan kemeja merah berbahan tenun Endeck khas Bali.

Xanana sempat memperagakan gerakan lainnya baris-berbaris kemudian memberi hormat dengan membungkukkan badannya ketika berhadapan dengan Jokowi. Aksi tersebut mengundang tawa Presiden Jokowi, yang kemudian menyalami Xanana dan mengajukannya mengobrol sebentar.

Jokowi juga menyambut kedatangan PM Niue Dalton Tagelagi, Presiden Mikronesia Wesley Simina, PM Sao Tome and Principe Partice Emery Trovoad, dan PM Tuvalu Kausea Natano. Selain itu, Deputi PM Fiji Manoa Seru Nakausabaria Kamikamica dan Deputi PM Tonga Samiua Kuita Vaipulu.

Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengatakan, Forum Negara Pulau dan Kepulauan (AIS Forum) harus menjadi acuan untuk mengembangkan kerja sama yang inklusif dalam menangani beragam tantangan global. Penguatan kerja sama multilateral melalui AIS Forum disebutnya penting untuk menghadapi berbagai krisis di

antaranya perubahan iklim dan naiknya permukaan air laut, polusi laut, dan hilangnya keanekaragaman hayati.

"Indonesia dan kita semua memilih jalan yang benar, memilih jalur kerja sama dan solidaritas yang inklusif. Ini adalah saat yang mendesak bagi kita sebagai negara pulau dan kepulauan untuk berdiri dalam solidaritas dan kerja sama," tutur Retno ketika memimpin Pertemuan ke-5 Tingkat Menteri AIS Forum di Nusa Dua, Bali, Selasa.

Guna mencapai tujuan tersebut, Menlu RI menyerukan

perluinya menjamin solidaritas di antara negara pulau dan kepulauan untuk menghadapi tantangan bersama. "AIS Forum harus terus menghasilkan upaya inovatif untuk menjamin keberlanjutan laut kita dalam mengatasi tiga krisis yang ada," tuturnya.

Forum tersebut, Retno menegaskan, harus mampu menghasilkan kerja sama nyata untuk empat fokus utama yaitu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, ekonomi biru dan ekowisata, sampah plastik laut dan pesisir, serta tata kelola maritim yang baik. (Ant/San)-d



Prakiraan Cuaca Rabu, 11 Oktober 2023						
Lokasi	Pagi	Siang	Malam	Dini Hari	Suhu °C	Kelambaban
Bantul					22-30	65-95
Sleman					22-29	65-95
Wates					22-29	65-95
Wonosari					22-30	65-95
Yogyakarta					22-30	65-95

Menyoal Syarat Kelulusan Perguruan Tinggi Tanpa Skripsi



Raden Arditya Mutwara I
Dosen Ilmu Komunikasi
Universitas Amikom Yogyakarta

MESKIPUN sudah resmi diberlakukan sejak Agustus 2023, tetapi Permendikbud Ristek Nomor 53 Tahun 2023

masih menyisakan tanda tanya. Untuk yang mungkin melewati tentang hiruk pikuk isu ini, ada baiknya Anda langsung buka laman pencarian dan cari Permendikbud Ristek Nomor 53 Tahun 2023. Nadiem Makariem, selaku Menteri Pendidikan mengeluarkan surat keputusan berupa Peraturan Menteri yang menjelaskan aturan baru terkait skripsi sebagai syarat kelulusan mahasiswa. Skripsi yang selama ini generasi saya pahami sebagai prasyarat utama supaya bisa lulus dari Perguruan Tinggi akan "diturunkan" derajatnya.

Dalam Permendikbud Ristek Nomor 53 Tahun 2023 tersebut secara terperinci

dituliskan bahwa skripsi sudah bukan satu-satunya syarat untuk bisa lulus. Jadi skripsi tidak sama sekali dihilangkan, tetapi pak Nadiem memberikan alternatif lain untuk mahasiswa yang ingin lulus tanpa mengerjakan skripsi. Sejak zaman saya masih kuliah dulu, memang skripsi menjadi salah satu momok atau alaan mengapa banyak mahasiswa yang bisak dibilang "kabur" dari kampus. Ya, salah satu alasan mereka tidak kunjung lulus atau menyelesaikan studi adalah skripsi.

Skripsi sebagai satu-satunya syarat kelulusan memang sukses "mempersulit" mereka yang tidak kuat pendirian untuk

segera selesai kuliah. Meskipun untuk mereka-mereka yang punya tekad kuat untuk segera menuntaskan masa studi, akhirnya tetap dapat selesai tepat waktu. Semoga alasan pak Nadiem memberikan alternatif selain skripsi bukan karena angka kelulusan yang rendah. Dikatakan oleh pak Nadiem bahwa alternatif sengaja diberikan untuk perguruan tinggi supaya mereka lebih leluasa dalam menentukan standar kelulusan untuk mahasiswanya. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah standar kelulusan ini berdasar atas keputusan siapa?

Skripsi dahulu memang disepakati sebagai satu-

satunya syarat kelulusan karena sudah ada beberapa poin-poin penilaian yang dipandang dapat digunakan sebagai penyetaraan untuk semua lulusan dari perguruan tinggi. Kesepakatan ini tentunya tidak diperoleh dalam waktu dan tempo yang singkat. Saat ini ketika semua universitas dan pendidikan tinggi lain di seluruh Indonesia dihadapkan dengan otonomi untuk menentukan standar kelulusan sendiri, maka apa yang dapat dijadikan patokan harus jelas. Ketika dasar yang menjadi acuan untuk menggantikan skripsi itu belum jelas, maka alangkah baiknya ada kajian secara holistik atau menyeluruh tentang

peraturan ini.

Dalam Permendikbud Ristek nomor 53 tahun 2023 memang disebutkan apa-apa saja yang dapat menjadi alternatif selain skripsi, yakni prototipe dan proyek. Tapi ini dengan syarat program studinya sudah menjalankan kurikulum berbasis proyek atau bentuk lain sejenis. Pada dasarnya memang semua masih butuh dikaji meskipun sudah ada beberapa universitas yang menerapkan syarat kelulusan selain skripsi. Dunia pendidikan tinggi tidak boleh bersikap tertutup akan ide-ide dan gagasan baru terkait syarat kelulusan. Tapi juga tidak dapat meniadakan begitu saja tentang syarat kelulusan berupa skripsi.



Akhirnya semua akan kembali pada keputusan masing-masing perguruan tinggi yang diharapkan pak Nadiem dapat lebih "fleksibel" untuk menemukan cara meluluskan mahasiswanya. Semoga dari niat dan harapan yang baik, kedepannya lingkungan pendidikan tinggi di Indonesia punya harapan yang lebih baik. Mencetak lulusan-lulusan dengan kualitas terbaik untuk ikut membangun bangsa dan negara Indonesia ke arah yang lebih baik lagi.